



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARTO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **1028443**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.235.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/153 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
3. Tanah Seluas 4.579 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, Rp. 165.000.000		
4. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	11.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X 100 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	30.254.234
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	545.354
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.326.799.588



III. HUTANG

Rp. 398.644.134

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 928.155.454

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.